



Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024 : 151 – 162

<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>

DOI: 10.33592/jiia.v14i2.4953

p-ISSN 2477-5088

e-ISSN 2716-2621

Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kota Mataram

The Impact of Regional Government Policies on MSMEs Empowerment and Economic Growth in Mataram City

¹Muhammad Aprian Jaelani; ²Nurul Fidaris

^{1,2}Administrasi Publik/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

Email: aprian.jaelani@ummat.ac.id; nurulfidaris789@gmail.com

(Diterima: 31-07-2024; Ditelaah: 18-08-2024; Disetujui: 22-08-2024)

ABSTRAK

Ketidaksesuaian antara potensi UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan implementasi program pemberdayaan UMKM di tingkat pemerintah daerah, Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran pemerintah daerah dalam meningkatkan ekonomi melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah kota Mataram. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana pemerintah daerah mampu bertindak sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam mendorong pengembangan UMKM. Berdasarkan kerangka teoritis Gede Diva (2019), penelitian ini mengasumsikan bahwa peran pemerintah yang optimal dalam konteks pemberdayaan UMKM adalah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan publikasi terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengklasifikasikan temua berdasarkan tema atau subtopik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pemberdayaan UMKM di kota Mataram. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya potensi peningkatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta perlunya kebijakan yang lebih mendukung dalam rangka mengoptimalkan program pemberdayaan.

Kata kunci: UMKM, Pemerintah Daerah, Ekonomi, Mataram

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan ekonomi lokal. UMKM memainkan peran krusial dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan masyarakat yang sejahtera. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam penguatan ekonomi Indonesia, menurut Akbar, dkk (2023). Ajeng Wulansari dan L. Hakim (2021) menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas

Muhammad Aprian Jaelani; Nurul Fidaris (2024). Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kota Mataram

masyarakat di berbagai aspek, dengan sasaran utama menciptakan kemandirian serta membebaskan masyarakat dari lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan itu M. Ruslan dan Abd. Kadir (2022) menegaskan bahwa karena peran penting UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah, pemberdayaan UMKM oleh pemerintah daerah diperlukan agar mereka dapat menjadi usaha yang mandiri dan tangguh. Fungsi utama pemerintah adalah mengelola kegiatan pembangunan dan memberikan pelayanan publik sebagai bagian dari tugas umum pemerintahan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, Kurniawan (2020)..

Menurut Soekanto (2014) dalam Lailiyah, dkk (2020), peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu yang menempati posisi tertentu dalam struktur sosial dan memiliki persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut meliputi beberapa aspek, salah satunya adalah norma-norma yang terkait dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Ini berarti peran adalah aturan-aturan yang membimbing individu dalam interaksi sosial mereka. Kedua, peran merujuk pada perilaku yang diterapkan oleh individu dalam konteks organisasi masyarakat, dan juga merupakan perilaku penting dalam struktur sosial. Ketiga, peran dapat dianggap sebagai elemen krusial dalam struktur sosial masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah yaitu dengan mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan ekonomi tersebut.

Menurut Ina Primiana (2009), pengertian UMKM mencakup pengembangan empat sektor ekonomi utama yang menjadi pendorong utama pembangunan di Indonesia, yaitu industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, dan pengembangan sumber daya manusia. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian negara, antara lain sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sebagai salah satu faktor pengurang kemiskinan, sebagai sarana menuju ekonomi yang berfokus pada rakyat, penyerap tenaga kerja, penguat ekonomi domestik, serta berbagai tujuan sosial-ekonomi lainnya untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan, Masruroh, dkk (2021).

Hadion Wijoyo (2020) juga menyatakan bahwa UMKM adalah strategi untuk mengembangkan bisnis tertentu dengan tujuan mempercepat pemulihan ekonomi, yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk program-program prioritas serta pengembangan potensi dan sektor-sektor yang tersedia. Menurut Gede Diva (2019), dalam pengembangan UMKM, peran pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan melalui tiga fungsi utama, yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Pemberdayaan UMKM diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus memperhatikan UMKM di wilayahnya masing-masing sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan UU yang telah diatur dan disepakati. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Bab II Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam ekonomi Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek utama seperti yang dijelaskan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2005:

1. UMKM merupakan pemain utama dalam berbagai sektor ekonomi.
2. UMKM berperan sebagai penyedia lapangan kerja.

3. UMKM memiliki peran penting dalam mengembangkan ekonomi lokal dan memberdayakan masyarakat.
4. UMKM menjadi pencipta pasar baru dan sumber inovasi.
5. UMKM memberikan kontribusi dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Pemberdayaan UMKM telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diharapkan memperhatikan UMKM di wilayahnya sebagai bentuk implementasi kebijakan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Kota Mataram sudah mengimplementasikan kebijakan tersebut yaitu melakukan upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. UMKM kota Mataram telah cukup berkembang sehingga terdapat peningkatan pertumbuhan ekonomi yang positif di kalangan masyarakat.

Berikut merupakan grafik laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lapangan Usaha kota Mataram selama 5 tahun terakhir.



Sumber : <https://mataramkota.bps.go.id/>

Gambar 1. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Kota Mataram tahun 2019-2023

Dari data pada gambar 1 diatas, dapat dilihat bahwa Sektor ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh positif, namun kemudian mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020. Setelah itu, sektor ini kembali tumbuh positif hingga tahun 2023, meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan tahun 2019. Fluktuasi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh perubahan daya beli masyarakat, kebijakan pemerintah, serta perkembangan e-commerce. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup stabil selama periode pengamatan, meskipun dengan laju pertumbuhan yang bervariasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan sektor ini mengindikasikan peningkatan aktivitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Sektor konstruksi mengalami kontraksi yang sangat dalam pada tahun 2020, kemungkinan besar akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan

penurunan aktivitas pembangunan. Namun, sektor ini berhasil pulih dengan cepat dan menunjukkan pertumbuhan yang positif pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Kota Mataram, terutama pada sektor perdagangan dan konstruksi. Sektor-sektor ekonomi di Kota Mataram menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang cukup baik setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Sektor jasa keuangan dan asuransi menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya selama periode krisis.

Sedangkan untuk Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk setiap kabupaten/kota di provinsi NTB Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1
Jumlah UMKM Per Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Lombok Barat	16,635	0	0	16,635
2	Lombok Tengah	309	11	3	323
3	Lombok Timur	14,356	6,390	284	21,030
4	Sumbawa	5,501	4	3	5,508
5	Dompu	2,261	5	4	2,270
6	Bima	11,610	0	0	11,610
7	Sumbawa Barat	7,780	49	0	7,829
8	Lombok Utara	4,820	173	5	4,998
9	Kota Mataram	15,746	6,194	533	22,473
10	Kota Bima	7,904	2,293	411	10,608
Jumlah		86,922	15,119	1,243	103,284

Sumber : <https://data.ntbprov.go.id>

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa kota Mataram memiliki jumlah UMKM paling banyak dari semua kabupaten/kota di Provinsi NTB. Partisipasi masyarakat kota Mataram dalam meningkatkan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM cukup signifikan. Sehingga, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih efektif dalam pemberdayaan UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemberdayaan UMKM serta dampaknya terhadap perekonomian local di kota Mataram. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM di kota Mataram.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dengan topik penelitian. Metode studi literatur dipilih karena kemampuannya dalam memberikan wawasan yang mendalam melalui peninjauan berbagai sumber pustaka yang telah ada. Data dikumpulkan dari berbagai literatur, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan artikel-artikel

kredibel yang dipublikasikan dalam rentang waktu tertentu. Pemilihan rentang waktu ini bertujuan untuk memastikan relevansi dan aktualitas informasi yang digunakan. Proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi kata kunci yang relevan dengan topik penelitian untuk mencari literatur yang sesuai.

Artikel yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan judul dan abstraknya, dan yang memenuhi kriteria kualitas, seperti melalui proses peer-review dan diterbitkan di basis data ilmiah yang terpercaya, diunduh dan dianalisis lebih lanjut. Evaluasi kualitas literatur dilakukan dengan mempertimbangkan metodologi, validitas temuan, dan relevansi dengan topik penelitian. Setelah literatur yang relevan terpilih, informasi dari berbagai sumber tersebut disintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema atau subtopik yang relevan, serta membandingkan dan menilai teori serta konsep yang diungkapkan dalam literatur. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk cross-check informasi, replikasi untuk memastikan temuan dapat diperoleh kembali, dan transparansi prosedur untuk memudahkan verifikasi oleh peneliti lain. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang [topik penelitian] serta mengidentifikasi area yang memerlukan penelitian lebih lanjut di masa depan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sebagai pilar fundamental dalam dinamika ekonomi Kota Mataram. Kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan total 22.473 unit usaha, Kota Mataram menempati posisi terdepan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal jumlah UMKM. Analisis mendalam menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM di Kota Mataram tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah yang bertindak sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Sebagai fasilitator, pemerintah telah berhasil meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui program pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan yang lebih mudah. Upaya ini terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong inovasi produk. Dalam peran sebagai regulator, pemerintah telah menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui simplifikasi perizinan dan perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai katalisator dengan menyediakan infrastruktur pendukung, seperti pasar dan pusat pelatihan, serta memfasilitasi akses terhadap pasar yang lebih luas. Hal ini telah mendorong peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk UMKM. Meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi akibat pandemi COVID-19, UMKM di Kota Mataram menunjukkan resiliensi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM telah mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan memanfaatkan peluang yang ada. Peningkatan jumlah UMKM aktif dan kontribusi mereka terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi bukti nyata dari pemulihan ekonomi yang terjadi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam

pembangunan ekonomi, terutama di Kota Mataram. Sebagai tulang punggung perekonomian lokal, UMKM berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Menurut Gede Diva (2019), dalam konteks pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peran pemerintah yang optimal dapat diwujudkan melalui tiga fungsi utama, yaitu peran sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Dalam perannya sebagai fasilitator, pemerintah berperan aktif dalam memfasilitasi UMKM mencapai tujuan bisnisnya. Ketika UMKM menghadapi kendala dalam proses produksi, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan proses produksi, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas produksi UMKM melalui berbagai program pembinaan. Sebagai regulator, pemerintah bertanggung jawab merumuskan kebijakan yang menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Sementara itu, sebagai katalisator, pemerintah berperan sebagai pendorong percepatan pertumbuhan UMKM sehingga dapat menjadi entitas bisnis yang lebih dinamis dan adaptif. Ketiga peran tersebut dapat dijadikan indikator kunci dalam mengevaluasi efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM di kota Mataram. Dalam pengembangan UMKM, pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator, Gede Diva (2019).

a. Peran Pemerintah Daerah Sebagai Fasilitator

Penelitian ini mengevaluasi peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemberdayaan UMKM di Kota Mataram serta dampaknya terhadap perekonomian lokal. Berdasarkan data yang diperoleh, Kota Mataram memiliki jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan total 22,473 unit usaha. Jumlah ini terdiri dari 15,746 usaha mikro, 6,194 usaha kecil, dan 533 usaha menengah. Tingginya jumlah UMKM ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Kota Mataram.

Tabel 2
Jumlah UMKM Per Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Lombok Barat	16,635	0	0	16,635
2	Lombok Tengah	309	11	3	323
3	Lombok Timur	14,356	6,390	284	21,030
4	Sumbawa	5,501	4	3	5,508
5	Dompu	2,261	5	4	2,270
6	Bima	11,610	0	0	11,610
7	Sumbawa Barat	7,780	49	0	7,829
8	Lombok Utara	4,820	173	5	4,998
9	Kota Mataram	15,746	6,194	533	22,473
10	Kota Bima	7,904	2,293	411	10,608
Jumlah		86,922	15,119	1,243	103,284

Sumber : <https://data.ntbprov.go.id>

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan UMKM di Kota Mataram menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi cukup signifikan. Muhammad Aprian Jaelani; Nurul Fidaris (2024). *Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kota Mataram*

Data ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pemberdayaan UMKM telah berhasil menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat. Pendidikan dan Pelatihan UMKM kota Mataram telah mendorong perkembangan UMKM. Berikut merupakan dokumentasi Pendidikan dan Pelatihan terhadap pelaku UMKM oleh pemerintah kota Mataram.



Sumber : Facebook Perindustrian Koperasi UKM Mataram

Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan UMKM kota Mataram tahun 2024

Adanya program pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang intensif dari pemerintah daerah Kota Mataram telah berperan sebagai katalisator dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai fasilitator, pemerintah daerah secara proaktif membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing usahanya.

Program-program tersebut dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik UMKM di berbagai sektor, sehingga mampu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan inovasi. Evaluasi terhadap dampak program pelatihan dan pendampingan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada berbagai indikator kinerja UMKM, seperti peningkatan omset, perluasan jaringan pemasaran, dan

adopsi teknologi baru. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program tersebut telah berhasil meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM dalam mengelola usahanya. Selain itu, program pendampingan yang berkelanjutan juga telah berhasil membangun jejaring sosial antar pelaku UMKM, sehingga memfasilitasi terjadinya kolaborasi dan pengembangan klaster industri. Pemberian bantuan modal yang tepat sasaran telah menjadi salah satu faktor kunci dalam mengatasi kendala permodalan yang sering dihadapi oleh UMKM. Akses terhadap modal usaha tidak hanya memungkinkan UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga membuka peluang untuk melakukan diversifikasi produk dan memperluas pasar. Penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang menerima bantuan modal cenderung tumbuh lebih cepat dan memiliki tingkat keberlangsungan usaha yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, peran pemerintah daerah sebagai fasilitator telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap keberhasilan UMKM di Kota Mataram. Program-program yang telah dilaksanakan tidak hanya meningkatkan kinerja UMKM secara individual, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan melalui peningkatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan inovasi. Keberhasilan ini mengindikasikan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing.

b. Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator

Pemerintah daerah Kota Mataram telah menjalankan berbagai program dan kebijakan untuk mendukung perkembangan UMKM. Kebijakan ini termasuk pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku UMKM, pemberian bantuan modal untuk mengatasi masalah permodalan, serta fasilitasi akses pasar untuk membantu UMKM memasarkan produknya lebih luas. Penerapan kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM.

Pemerintah daerah telah menerapkan berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan UMKM, termasuk penyederhanaan izin usaha, pengurangan biaya retribusi, dan regulasi yang memberikan perlindungan bagi pelaku UMKM dari persaingan yang tidak sehat. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 24 Tahun 2015 mengatur tentang pemberian wewenang kepada camat di Kota Mataram untuk melaksanakan proses perizinan bagi usaha mikro dan kecil. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk peran pemerintah daerah kota Mataram sebagai Regulaor dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM.

Efektivitas program pemberdayaan UMKM yang dijalankan pemerintah daerah dapat dilihat dari meningkatnya jumlah UMKM yang aktif dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Berikut merupakan grafik laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Mataram dari tahun 2019-2023.



Sumber : <https://mataramkota.bps.go.id/>

Gambar 3. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Kota Mataram tahun 2019-2023

Analisis terhadap fluktuasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor perdagangan, jasa keuangan, dan konstruksi di Kota Mataram menunjukkan adanya dinamika ekonomi yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Meskipun tidak terdapat tren linear yang jelas, namun dapat diamati bahwa ketiga sektor ini cenderung menunjukkan pola siklikal, dengan pertumbuhan yang baik pada tahun-tahun ekspansi ekonomi dan kontraksi pada saat terjadi guncangan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja sektor-sektor tersebut sangat sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Kota Mataram, terutama pada sektor perdagangan dan jasa keuangan. Pembatasan mobilitas dan aktivitas ekonomi yang diberlakukan pemerintah untuk menekan penyebaran virus menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga berdampak pada kontraksi pada kedua sektor tersebut. Namun demikian, sektor konstruksi justru mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun-tahun berikutnya, yang kemungkinan disebabkan oleh adanya program-program stimulus pemerintah untuk mendorong investasi di sektor infrastruktur. Fluktuasi PDRB pada ketiga sektor tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai regulator dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, serta penyediaan infrastruktur yang memadai, dapat membantu meredam dampak negatif dari guncangan eksternal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan dan melakukan penyesuaian agar tetap relevan dengan kondisi perekonomian yang terus berubah.

Secara keseluruhan, analisis terhadap PDRB di Kota Mataram menunjukkan bahwa program dan kebijakan pemerintah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terintegrasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

c. Peran Pemerintah Daerah sebagai Katalisator

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat krusial sebagai katalisator dalam mengakselerasi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan mendorong dinamika ekonomi lokal. Dalam konteks Kota Mataram, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memfasilitasi perkembangan UMKM melalui penyediaan berbagai infrastruktur pendukung, seperti pasar tradisional modern, pusat pelatihan berstandar, dan pusat inkubasi bisnis. Fasilitas-fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berjualan, tetapi juga sebagai wadah bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses terhadap pengetahuan, teknologi, dan jaringan bisnis yang lebih luas. Selain itu dibutuhkan juga Kolaborasi dengan pihak swasta: karena pentingnya kolaborasi dengan pihak swasta, seperti perusahaan besar atau lembaga keuangan, dapat memberikan dukungan finansial dan teknis kepada UMKM, Pemanfaatan teknologi: pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan UMKM, seperti e-commerce, pemasaran digital, dan sistem informasi manajemen dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing. Berikut beberapa pemanfaatan teknologi yang umum dilakukan UMKM dan yang terakhir Pengembangan produk unggulan daerah: Menyoroti upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis UMKM, sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun internasional.

Selain menyediakan fasilitas fisik, pemerintah daerah juga berperan aktif dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Program-program pembinaan yang komprehensif, mulai dari tahap perencanaan usaha hingga pemasaran produk, telah berhasil meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM. Pentingnya pembinaan ini underscored oleh Harninda (2022), yang menekankan bahwa peran pemerintah tidak hanya sebatas menyediakan fasilitas, tetapi juga memberikan dukungan teknis yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, pemerintah daerah Kota Mataram juga telah berupaya menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Hal ini dilakukan melalui deregulasi perizinan usaha, penyederhanaan prosedur administrasi, dan penguatan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mengurangi hambatan birokrasi dan menciptakan iklim investasi yang menarik bagi pelaku usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai katalisator telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Mataram. Namun demikian, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap program dan kebijakan yang telah dilaksanakan, serta melakukan penyesuaian agar tetap relevan dengan dinamika perekonomian yang terus berubah.



Gambar 4. Dokumentasi Infrastuktur untuk mendukung UMKM kota Mataram

Pemerintah daerah secara aktif memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM melalui program pelatihan, workshop, dan konsultasi bisnis. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan teknis pelaku UMKM, sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan lebih efisien dan profesional.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam memberdayakan UMKM. Kedepan, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM, memperkuat akses terhadap teknologi informasi, serta mengembangkan ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan demikian, UMKM dapat terus menjadi motor penggerak perekonomian Kota Mataram dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, K., Jaelani, A., Alambana, B. M., Athuri, S. S., Cahyani, D. W., Arianti, R., ... & Setiawan, A. (2023). Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Value Added (Nilai Tambah) Produk Tempe melalui Inovasi Olahan Tempe untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Keroya. *Jurnal Wicara Desa*, 1(1), 1-11.
- Diva, Gede. 2019. "Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah" Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Hadion Wijoyo, Digitalisasi UMKM (Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020).
- Harninda, Yola. 2022. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Pengolahan Kopi di Kota Banda Aceh. *Skripsi UIN AR-RANIRY Banda Aceh*, Hal 1-105.
- Lailiyah, I. S., Kusbandrijo, B., & Murti, I. EVALUASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA DI DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN.
- Masruroh, I., Andrean, R., & Arifah, F. (2021). Peran pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi covid-19 bagi UMKM di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(1), 41-48.
- Muhammad Aprian Jaelani; Nurul Fidaris (2024). Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kota Mataram*

- Muh. Ruslan Abdullah dan Abd. Kadir Arno, Reincarnation of MSMEs After the Government's Policy on Economics Recovery Due to the Covid-19 Pandemic in Indonesia, *Technium Social Sciences Journal*, Vol.27, 452-462, 2022, www.techniumsciencea.com
- Kurniawan, I. A. (2020). GOOD GOVERNANCE BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PROGRAM KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA TANGERANG. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, 10(1), 22-34.
- Wulansari, A, and L Hakim. "Strategi Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM." *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 7, no. 1 (2021): 8293. <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5172/3623>.
- Primiana, Ina. 2009. *Menggerakkan Sektor Rill UKM dan Industri*. Bandung : Alfabeta
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah